

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas. 2012. *Asas Hukum Pidana*. Mahakarta Rangkang Offset. Yogyakarta.
- Alison Burke *et.al.* *SOU- CCJ230 Introduction to the American Criminal Justice System*. Open Oregon Educational Resources.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Nas Media Pustaka. Makassar
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Insertium dan KontraS. 2022. *Dua Dasawarsa Nirpidana: Kelemahan UU Pengadilan HAM dan Gagalnya Negara Menegakkan Keadilan*. KontraS. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta.
- J. E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Lorraine Wolhuter *et.al.* 2009. *Victimology: Victimisation and Victims' Right*. Routledge-Cavendish. Abingdon.
- Knut D. Asplund *et.al.* 2015 *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII. Yogyakarta.
- Komnas HAM. 2020. *Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*. Tim Publikasi Komnas HAM. Jakarta.
- KontraS. 2008. *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok*. KontraS. Jakarta Pusat.

- Leah E. Daigle. 2017. *Victimology*. Sage Publications. California.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Rajawali Pers. Depok.
- Maurice Dawso et. al. 2017. *Developing Next-Generation Countermeasures for Homeland Security Threat Prevention*. IGI Global. USA.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group. Jakarta Timur.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta Selatan.
- Syarif Saddam Rivanie Parawansa. 2022. *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)*. Penerbit KBM Indonesia. Yogyakarta.
- US Army. 2007. *A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century*. US Army. Kansas.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Abdul Haris Semendawai. "Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Vol 16, No. 7 (2016).
- Agus Suparmono. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia". Journal of Law: Vol. 6, No. 1.
- Andrey Sujatmoko, "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional". Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 3, No. 2. (2016).
- Marnex L. Tatawi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)". Lex et Societatis: Vol. III, No. 7. (2015).
- Musnaini. "Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

Ditinjau Menurut Hukum Islam “Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum”. Vol. 6, No. 2. (2017).

Syarif Saddam Rivanie. “*Pengadilan Internasional Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik*”, Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 3. 2020.

Tirta Mulya Wira dan Khoiril Huda. “*Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*”. Lex Scientia Law Review: Vol. 1, No. 1 (2017).

LAPORAN ATAU HASIL PENELITIAN

IJRS. 2022. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*. IJRS. Jakarta.

Jo-Anne Wemmers. 2021. *Report Prepared for the Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime. Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime..* Canada.

Komnas HAM. 2020. *Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*. Tim Publikasi Komnas HAM. Jakarta.

Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (ed). 2016. *Kekerasan Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Depok.

LPSK. 2020. *Laporan Tahunan LPSK 2020*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta Timur.

LPSK. 2021. *Kerja Keras Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Laporan Tahunan LPSK 2021*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta Timur.

Nikmatul Hidajanti (ed). 2017. *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta Timur.

SKRIPSI

Diana Rezki. 2008. *Mekanisme Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ghina Yazid Najla. 2018. *Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Dan Terorisme (Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Monika. 2022. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

MAKALAH

Abdul Munif Ashri. 2021. *Tipologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Makalah. Kelas Penerimaan Anggota Insititut Demokrasi, Hukum, dan HAM. Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM (Inersium). Makassar. 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).

Peraturan Komnas HAM Nomor 001A/PER.KOMNAS HAM/III/ 2014 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban Dan/Atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 485).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Kompensasi, Bantuan Medis, Atau Rehabilitasi Psikososil dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Salalu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1038).

Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime Abuse of Power (1985)

Rome Statute of the International Criminal Court (1998, UN Treaty Series, Vol. 2187).

Rule of Procedure and Evidence (2005).

RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Commission on Human Rights. "Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil And Political)". (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1).

Commission on Human Rights. "Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity". (UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1).

UN General Assembly Resolution 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. (UN Doc. A/RES/60/147).

MEDIA MASSA DAN SUMBER ELEKTRONIK

Komnas Perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”. <<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>> Diakses 1 November 2022.

Lektur.ID. “Arti Ganti Rugi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. <<https://kbbi.lektur.id/ganti-rugi>>. Diakses 1 November 2022.

Muchlisin Rusdi. “Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)”. 7 September 2020. <<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>>. diakses 2 November 2022.

Rama Yulianto. “Kekerasan Seksual: Konstruksi Sosial Patriarki?”. 3 Februari 2022. <<https://geotimes.id/opini/kekerasan-seksual-konstruksi-sosial-patriarki/>>. Diakses 8 Februari 2023

Tim Hukumonline. “Terorisme Menurut Hukum Indonesia: Pelakunya Bisa Dipidana Mati”. 4 November 2021. <<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-1t6183b09848f15>>. Diakses 27 Oktober 2022.

Wawancara

Wawancara Sriyana (Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 4 Januari 2023.